

## **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Sikka**

**Elisabeth Nona Leni<sup>1</sup>**  
Universitas Nusa Nipa  
Email: lenielisabeth2@gmail.com

**Andreas Rengga<sup>2</sup>**  
Universitas Nusa Nipa

**Magdalena Silawati Samosir<sup>3</sup>**  
Universitas Nusa Nipa

### **ABSTRACT**

*This study aimed to determine the level of efficiency and effectiveness of regional financial management at the Department of Housing, Settlement Area and Land of Sikka Regency, East Nusa Tenggara province. The analysis was done by calculating the level of efficiency and effectiveness of regional finance. The data used the report on the realization of the Regional income and Expenditure Budget at the Department of Housing, Settlement Area and Land of Sikka Regency in 2018-2022. The research method employed descriptive quantitative. The research population was the regional income and expenditure budget for 2018-2022. The sample used in this research was the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports for 2018-2022. The research findings showed that the efficiency level of regional financial management at the Department of Housing, settlement Area and Land of Sikka Regency in 2018-2022 was quite efficient with an average of 82,15% which indicates that the regional financial management system in the direct expenditure budget had not reached the optimal target. Meanwhile, the level of effectiveness of regional financial management at the Department of Housing, Settlement Area and Land of Sikka Regency in 2018-2022 was classified as effective with an average of 92,26% indicating that the program had reached the set target.*

**Keywords: Efficiency, Effectiveness**

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan dengan menghitung tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas keuangan daerah. Data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Periode 2018-2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Populasi penelitian yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018-2022. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022 tergolong cukup efisien dengan rata-rata sebesar 82,15% ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran belanja langsung belum mendekati target yang optimal. Sedangkan tingkat efektivitas Pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022 tergolong efektif dengan rata-rata sebesar 92,26% hal ini menunjukkan bahwa tercapainya program dengan target yang sudah ditetapkan.

**Kata Kunci :** *Efisiensi, Efektivitas*

## LATAR BELAKANG

Berbagai aktivitas bisnis tidak terlepas dari peran sentral manajemen keuangan karena tanpa adanya manajemen keuangan, proses pengalokasian dana akan sulit dan proses kegiatannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen keuangan sangat penting dipelajari untuk banyak orang yang hendak menggunakan uangnya seefektif dan seefisien mungkin, terlebih bagi mereka yang hendak berbisnis

Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang yang fokus pada penggunaan modal, uang pinjaman, dan dana bisnis lainnya secara efisien dan efektif serta proses pengambilan keputusan yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan penambahan nilai suatu entitas. Secara garis besar manajemen keuangan adalah proses kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan, seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Seluruh kegiatan tersebut diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan. (Rini Astuti, Mawar Ratih, (2021:1103-1699).

Menurut Mahmudi (2010:85) mendefinisikan efisiensi merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan atau input beserta keluaran atau output, atau mengukur perbandingan antar hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang di gunakan. Efisiensi berarti suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan, dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, tetapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien.

Menurut Sedarmayanti (2009:61). dalam Rengga, *et al* (2020:61) Efektivitas

merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memperdiksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintahan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Menurut Mardiasmo (2009:240) keberhasilan penyelenggaraan ekonomi daerah ditentukan oleh kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan pengaruh laju pertumbuhan pembangunan daerah secara langsung yang berasal dari daerah tersebut, serta semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal perencanaan dan penyediaan dana.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan, yang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya, meliputi perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Penelitian yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas telah ada sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Osi Kusumawati (2022) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2016-2020 telah memenuhi kriteria efektif. Tingkat efisiensi selama periode tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran cukup efisien.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Laurensius Hale, SE selaku Kepala Bidang Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka mengatakan bahwa masih ditemukan permasalahan terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yaitu mengenai SDM yaitu keterbatasan tenaga kerja dan kendala dibagian keuangan yaitu keterbatasan keuangan, serta peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka. Kantor kedinasan ini memiliki tugas sebagai pembantu urusan pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang perumahan,

pertanahan dan permukiman pada daerah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Berikut data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka selama lima ( 5 ) tahun terakhir.

Tabel 1.1 Laporan realisasi APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>
2018	15.678.245.440,00	14.704.831.651,00
2019	17.917.950.627	16.535.871.985
2020	7.077.571.934.00	6.959.573.890,00
2021	18.641.094.226,00	18.449.782.600,00
2022	29.531.536.336	21.527.587.273,00

*Sumber : LRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Sikka*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya program dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih ada program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala yang tidak dapat terealisasi pada tahun anggaran berjalan. Dan Keterbatasan sumber daya keuangan karena pada tahun 2019 terjadi covid bahwa keuangannya itu sering dialihkan untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui gambaran tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
- 2) Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
- 3) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Manteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Kuswandi (2016:115) dalam Dekrita, *et al* (2022:55) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala suatu

berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Sari (2016:679-692) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Etika Kerja**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Analisis Rasio Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah**

Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki andil terbesar dalam upaya perkembangan suatu daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah Menggunakan berbagai pendekatan yaitu :

#### 1. Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2008:234) dalam Samosir, *et al* (2019:70) Efisiensi adalah Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

#### 2. Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan meneliti APBD Tahun menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2019:126) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi penelitian ini yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka tahun anggaran 2018-2022.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Menurut Dana P. Turner (2020:8-12), menyatakan bahwa Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka tahun anggaran 2018-2022.

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Pemerintah daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Definisi dari variabel-variabel tersebut adalah :

#### 1) Rasio Efisiensi

Mahmudi (2010:85) mendefinisikan efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan dan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

#### 2) Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004:8) mendefinisikan bahwa efektivitas diartikan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tersebut tetapi efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu mengklasifikasikan kemudian menghitung, membandingkan dan menganalisa data yang ada menggunakan bantuan rasio-rasio atau pertimbangan antara satu jumlah tertentu dalam satuan-satuan hitungan.

Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio yang diukur dengan menggunakan perhitungan berikut :

#### 1. Rasio Efisiensi

Analisis Efisiensi, yang diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja langsung dengan dengan total realisasi belanja. Menurut Mahsun, (2009:352) rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efisiensi belanja adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1.2 kriteria kinerja keuangan (efisiensi)

<b>Presentase Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
100% keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat efisien

Sumber : Depdagri Nomor 690 tahun 1994.

## 2. Rasio Efektivitas

Analisis Efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Menurut Ulum (2012:32), rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efektivitas menurut Mahsun, (2009:352) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1.3 Kriteria kinerja Keuangan (efektivitas)

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
100%	Sangat efektif
90% -100%	Efektif
80% -90%	Cukup efektif
60% -80%	Kurang efektif
Dibawah dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690 Tahun 1994

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Rasio Efisiensi

Tabel 1.4 Rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka periode 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Anggaran Belanja Langsung</b>	<b>Realisasi Anggaran Belanja</b>	<b>Tingkat Efisiensi %</b>	<b>Kriteria</b>
2018	12.520.205.561,00	14.704.831.651,00	85,14%	Cukup efisien
2019	14.588.778.165	16.535.871.985	88,23%	Cukup efisien
2020	5.197.982.075,00	6.959.573.890,00	74,69%	Efisien
2021	16.609.873.181,00	18.449.782.600,00	90,03%	Kurang efisien
2022	15.640.170.370,00	21.527.587.273,00	72,65%	Efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>12.911.401.870,40</b>	<b>15.635.529.479,80</b>	<b>82,15%</b>	<b>Cukup efisien</b>

*Sumber : Data diolah tahun 2023*

Berdasarkan perhitungan kinerja dengan menggunakan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi selama 5 tahun tergolong cukup efisien dengan rata-rata sebesar 82,15%. Dengan tingkat pencapaian di tahun 2018 sebesar 85,14% dengan kriteria cukup efisien, tahun 2019 sebesar 88,23% dengan kriteria cukup efisien, tahun 2020 sebesar 74,69% dengan kriteria efisien, tahun 2021 sebesar 90,03% dengan kriteria kurang efisien, dan tahun 2022 sebesar 72,65% dengan kriteria efisien.

Hal ini berarti bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran belanja dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka periode 2018-2022 mencakup cukup efisien

Tabel 1.5 Rasio efektivitas keuangan daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka periode 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Efektivitas %</b>	<b>Kriteria</b>
2018	15.678.245.440,00	14.704.831.651,00	93,79%	Efektif
2019	17.917.950.627	16.535,871.985	92,29%	Efektif
2020	7.077.571.934,00	6.959.573.890,00	98,33%	Efektif
2021	18.641.094.226,00	18.449.782.600,00	98,97%	Efektif
2022	29.531.536.336,00	21.527.587.273,00	72,90%	Kurang Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>17.769.279.712,60</b>	<b>15.635.529.479,80</b>	<b>91,26%</b>	<b>Efektif</b>

*Sumber : Data diolah tahun 2023*

Berdasarkan perhitungan kinerja menggunakan tingkat menunjukkan bahwa efektivitas penganggaran bahwa pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka periode 2018-2022. Pada tahun 2018-2021 dikategorikan efektif karena rasio perhitungannya berkisar antara 90-100% dengan masing-masing rasio perhitungan sebesar 93,79%, 92,29%, 98,33%, dan 98,97%. Pada tahun 2022 dikategorikan kurang efektif karena rasio perhitungannya sebesar 72,90%. Sehingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka dikategorikan efektif dengan rata-rata sebesar 91,26%, ini karena sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Sehingga Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan tingkat efektivitas yang dilakukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka realisasi program selama tahun 2018-2022 berada pada kriteria efektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai efisiensi dan efektivitas yang dilakukan pada anggaran belanja langsung serta kriteria yang didapat dari hasil perhitungan tersebut, maka kesimpulan dapat diambil bahwa efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka periode 2018-2022 menunjukkan hasil yang memuaskan. Fluktuasi tersebut dapat dilihat dari kriteria yang didapat tiap tahunnya.

1. Berdasarkan hasil perhitungan Tingkat rasio efisiensi menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran belanja langsung dari tahun 2017-2022 ini selalu berfluktuasi dengan mencapai rasio sebesar 82,15%, berada dalam kriteria cukup efisien. Hal ini berarti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran belanja langsung belum mendekati target yang optimal.
2. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat rasio efektivitas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2018-2022 selalu berfluktuasi juga dengan mencapai rasio sebesar 92,26% berada dalam kriteria efektif. Hal ini berarti bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah pada dinas perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka sudah efisien dalam melaksanakan anggaran program dengan mencapai target yang ditetapkan.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka dalam pengelolaan keuangan daerah untuk peneliti selanjutnya.

1. Dilihat dari tingkat efisien Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Sikka harus lebih memperhatikan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kinerja yang sangat efisien dengan meningkatkan belanja langsung sehingga kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan semua program atau kegiatan yang dianggarkan terlaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan efisiensi keuangan semakin membaik pada tahun-tahun berikutnya.
2. Dilihat dari tingkat efektivitas Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Sikka harus mempertahankan dan tetap meningkatkan kinerjanya agar telah memenuhi target-target indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai pembangunan dalam dokumen RPJMD.
3. Untuk peneliti selanjutnya  
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan yang didapatkan dalam penelitian ini sehingga penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi serta lebih memperdalam lagi terkait tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **REFERENSI**

- Astuti, R., Kartika, M. R., & Saptaria, R. (2021). *Manajemen keuangan perusahaan*. Bandung: CV. Widina Media Utama
- Dekrita, Y. A., Devinci, M. Y., & Samosir, M. S. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*. 9(2): 51-70.
- Kusumawati, O. K., Animah, A., & Isnawati, I. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Sosial Kota Mataram. *JIAI Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*. 7(2): 125-141.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. (2009). *Kebijakan desentralisasi fiskal di era reformasi*. in A. d. Abimanyu, era baru kebijakan fiskal, pemikiran, konsep dan implementasi. Jakarta: Penerbit Kompas.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Depdagri Nomor 690 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Maumere. *Jurnal Program Studi Manajemen*. 7(1): 55-72.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, I. P., Agusti, R. M., & Rofika, R. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra) (Doctoral Dissertation, Riau University). *JOM Fekon*. 3(1).
- Samosir, M. S. (2019). Analisis potensi, efektivitas dan efisiensi retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*. 6(1): 65-81.
- Turner, D. P. (2020). *Metode pengambilan sampel dalam rancangan penelitian*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI).